

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengembangan pendidikan bukanlah pekerjaan sederhana karena pengembangan tersebut memerlukan adanya perencanaan secara terpadu dan menyeluruh. Terkait dengan fungsi lembaga pendidikan sebagai salah satu tempat meningkatkan sosial budaya masyarakat, maka hubungan dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Hubungan lembaga pendidikan sekolah dan masyarakat adalah bagian internal yang tidak dapat dipisahkan yaitu mempunyai substansi sebagai sarana komunikasi *two way traffic communication* dan bersama-sama untuk bertanggung jawab kearah terciptanya tujuan pendidikan yang dicita-citakan bersama.

Salah satu manajemen yang penting di sekolah adalah manajemen hubungan masyarakat (humas), karena sekolah berada ditengah-tengah masyarakat dan selalu berhubungan dalam menjalin kerja sama yang pedagogis dan sosiologis yang menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan masyarakat telah diformulasikan dengan cara yang berbeda-beda bergantung pada lembaga atau organisasi yang membuat formulasi tersebut.

Makin majunya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadikan kerja sama sekolah dengan masyarakat sebagai kebutuhan vital. Kerja sama tersebut dimaksudkan demi kelancaran pendidikan di sekolah pada umumnya dan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada khususnya. Sekolah merupakan salah satu bagian dari sebuah masyarakat, jadi pengaturan sekolah harus dilihat dalam hubungannya dengan komponen-komponen

penyelenggara pendidikan lainnya kemudian dihubungkan dengan seluruh program masyarakat.

Berangkat dari titik tolak pemikiran ini maka perlu ada pengaturan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Humas dengan sekolah adalah salah satu bagian dari substansi administrasi pendidikan di sekolah. Dengan adanya hubungan sekolah dengan masyarakat, sekolah dapat mengetahui sumber-sumber yang ada dalam masyarakat yang kemudian didayagunakan untuk kepentingan kemajuan pendidikan anak di sekolah. Di lain pihak, masyarakat juga dapat mengambil manfaat dengan turut mengenyam dan menyerap ilmu pengetahuan sekolah. Dari sini kehidupan masyarakat akan ditingkatkan. Oleh karenanya, masyarakat dapat mengerti dan memahami tujuan pendidikan dan pelaksanaan pendidikan yang berlangsung di sekolah tersebut.<sup>1</sup>

Sebagaimana pendidikan pada umumnya, kita mengetahui bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Di manapun di dunia ini terdapat masyarakat, dan di sana pula terdapat pendidikan. Meskipun pendidikan merupakan suatu gejala yang umum dalam suatu kehidupan masyarakat, namun perbedaan filsafat dan pandangan hidup yang dianut oleh masing-masing bangsa atau masyarakat menyebabkan adanya perbedaan penyelenggaraan termasuk perbedaan sistem pendidikan tersebut. penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan yang hendak dicapainya. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang kita alami di Indonesia. Tujuan pendidikan

---

<sup>1</sup>Hwandyat Soetopo, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 151.

yang berlaku pada waktu orde lama berbeda dengan tujuan pendidikan setelah orde baru. Ini disebabkan pandangan filsafat bangsa Indonesia pada waktu orde lama berbeda dengan orde baru. Demikian pula sejak orde baru hingga sekarang, rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan dari pelita ke pelita sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia.<sup>2</sup>

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional ini memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan Nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penerapan semua ketentuan dalam undang-undang diharapkan dapat mendukung segala upaya untuk memecahkan masalah pendidikan, yang pada gilirannya akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap masalah-masalah makro bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, semua lapisan masyarakat yang terkait dengan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik konseptor, pengambilan kebijakan, pelaksana, maupun masyarakat hendaklah memiliki pemahaman yang baik terhadap isi undang-undang ini. Dengan kesetaraan pemahaman tersebut seluruh upaya pendidikan Nasional akan mendapatkan dukungan dari segala penjuru dan hal ini akan menjamin keberhasilan.

Disini kepala Madrasah mempunyai peranan sebagai pusat pengambilan keputusan menentukan sistem dan aturan pelaksanaan

---

<sup>2</sup>M. Ngalim Purwanto, *Imu Pendidikan Teoretis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 35.

pendidikan dan pencapaian tujuan sekolah yang telah ditentukan bersama. Sedangkan guru merupakan ujung tombak pelaksanaan dari keputusan dan kebijakan yang ditetapkan kepala sekolah.<sup>3</sup>

Menurut Islam pelaksanaan pendidikan agama itu merupakan perintah dari tuhan dan merupakan ibadah Ayat Al-Qur'an Surat An-Nah}l : 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nah}l: 125).<sup>4</sup>

Bukan lagi rahasia umum bila sistem pendidikan yang dikelola dalam iklim birokrasi dan sentralistik diyakini penyebab keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu terjadi karena sistem birokrasi yang selalu menempatkan “kekuasaan” sebagai faktor paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Kepala sekolah dan guru tak ubahnya sebagai “korban” yang setia mengikutinya. Kondisi itu memang ironis seharusnya merekalah yang paling berperan dalam pengambilan keputusan dalam mengatasi segala persoalan sehari-hari. Pada saat itu posisi kepala sekolah dan guru yang tidak berdaya dan tertekan oleh beberapa juklak dan juknis, pasti tidak sesuai dengan kenyataan objektif di masing-masing sekolah.

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: tp, 2003), i.

<sup>4</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an 2000), 421.

Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan, bahwa kekuasaan birokrasi persekolahan telah membuat sistem pendidikan tak pernah beranjak dari keterpurukan. Namun kini Depdiknas telah meluncurkan suatu pola baru yaitu manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pada MBS mengembalikan sekolah kepada pemiliknya yaitu masyarakat. Merekalah yang diharapkan akan merasa bertanggung jawab kembali sepenuhnya terhadap pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah.

Ada beberapa pertimbangan yang bisa ditangkap dari pola ini. pertama, pertimbangan moral. Sekolah dan masyarakatlah yang paling mengetahui berbagai persoalan pendidikan, termasuk persoalan yang dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan.

MBS berasumsi demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Sedang kepala sekolah, guru, dan masyarakat merupakan subyek utama dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah.

Dengan demikian segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkat mikro (di sekolah) harus dihasilkan dari interaksi antar ketiga pihak tersebut. Peran masyarakat dalam sekolah bisa dipahami apabila masyarakat adalah *stakeholder* pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan di sekolah. Mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak. Wajar pula bila sekolah-sekolah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kini masyarakat memiliki kekuatan di sekolah

melalui perwakilan fungsi *stakeholder* yang terbentuk dalam komite sekolah (KS) pada setiap sekolah dan dewan pendidikan di setiap kabupaten/kota.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (Studi Analisis Peran Komite Sekolah di Madrasah Salafiyah Syafi’iyah Bandung Krajan Diwek Jombang)”.

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di MI Salafiyah Syafi’iyah Bandung Krajan Diwek Jombang.
2. Waktu penelitian, penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan April 2015.
3. Subyek yang diteliti adalah semua *stakeholder* yang terlibat dalam kepengurusan Komite Sekolah di MI Salafiyah Syafi’iyah Bandung Krajan Diwek Jombang.
4. Variabel yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menfokuskan pada studi analisis tentang peran komite sekolah terhadap pengembangan pendidikan meliputi :
  - 1) Peran Komite Sekolah dalam menunjang proses belajar mengajar
  - 2) Peran Komite Madrasah dalam menunjang perluasan sarana prasarana
  - 3) Peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu lulusan.

---

<sup>5</sup>Muhammad Arifin, *Pemberdayaan Komite Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta 2006), 5.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan pendidikan di MI Salafiyah Syafi'iyah Bandung Krajan Jombang?
2. Bagaimana peran komite sekolah dalam pengembangan pendidikan di MI Salafiyah Syafi'iyah Bandung Krajan Jombang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengembangan pendidikan di MI Salafiyah Syafi'iyah Bandung Krajan.
2. Untuk mendeskripsikan peran komite sekolah di MI Salafiyah Syafi'iyah Bandung Krajan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan, terutama menambah wawasan tentang peran Komite Madrasah/Sekolah terhadap Pengembangan Pendidikan di MI sehingga dapat dijadikan bahan telaah dalam meningkatkan pengembangan lembaga pendidikan tersebut

## 2. Manfaat secara praktis

### a. Bagi Madrasah

Memperoleh informasi secara konkrit tentang kondisi obyektif Madrasah mengenai pelaksanaan pengembangan pendidikan.

### b. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan yang lebih konkrit dalam bidang pendidikan dan menambah wawasan dalam bidang penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai latihan dan pengembangan teknik - teknik yang baik khususnya dalam membuat karya tulis ilmiah, juga sebagai kontribusi nyata bagi dunia pendidikan.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Judul *Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam pada Siswa MIN Darul Ulum Peterongan Jombang*, Iik Muhammad Aqiyas, 2001.3301.0120, Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam, tahun 2004. Kesimpulan penelitian ini adalah peran komite sekolah dalam peningkatan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam pada Siswa di MIN Rejosolo Peterongan Jombang meliputi pengawasan pendidikan, perencanaan aktifitas pembelajaran yang berkesinambungan, selalu berintegrasi dan bersinkronisasi dengan komite madrasah sehingga tercipta peningkatan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam yang ada di MIN Darul Ulum Peterongan Jombang.



Persamaan  $X_1$  dan  $X_2$  yaitu persamaan: sama-sama ingin meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan bagaimana peran komite sekolah dalam melaksanakan peningkatan pendidikan. Perbedaan  $X_1$ ,  $X_2$  penelitian terdahulu membahas tentang peran komite sekolah dalam prestasi belajar. Peneliti membahas tentang peran komite sekolah dalam pengembangan pendidikan.

2. Judul *peran komite sekolah dalam peningkatan sarana prasarana di SDI Al-Rifa'i Gondang Legi Malang*, Lutfi Nur Hidayati, Fakultas Agama Islam Prodi PAI, tahun 2008. Kesimpulan penelitian ini adalah peran komite sekolah dalam peningkatan sarana prasarana di SDI Al-Rifa'i Gondang Legi Malang, selalu mengembangkan sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah yang berkesinambungan yang berintegrasi serta berkoordinasi secara dinamis dengan komite sekolah sehingga tercipta keselarasan dalam peningkatan sarana prasarana sekolah di SDI Al-Rifa'i Gondang Legi Malang.

Persamaan  $X_1$  dan  $X_2$  yaitu sama-sama ingin meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan bagaimana peran komite sekolah dalam peningkatan sarana prasarana. Perbedaan  $X_1$ ,  $X_2$  penelitian terdahulu membahas tentang peran komite sekolah dalam peningkatan sarana prasarana. Peneliti membahas tentang peran komite sekolah dalam pengembangan pendidikan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

- Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Pembahasan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.
- Bab II : Tujuan Pusat Sumber Belajar Untuk Menunjang Proses Pembelajaran, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Permendikbud No. 54/2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Bagian Keenam Tentang Komite Sekolah/Madrasah Pasal 196.
- Bab III : Desain Penelitian, Metode Penentuan Sampel atau Subyek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
- Bab V : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.